

## Berpartisipasi dalam Pemilu sebagai Panggilan Umat Beriman

Oleh THEODORUS SUDIMIN\*

*“Tidak ada gunanya kalau kita hanya dari jauh dan dari luar mengetahui atau merasa mengetahui kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam pemerintahan saja, lalu grondelan dan mengejek dari luar! Kita harus masuk di dalamnya, ikut memberikan arah yang benar, ikut berjuang, menjadi saksi nyata tentang kebenaran, keadilan dan cinta kasih”* (Soegijapranata, 1963).

Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif sudah di depan mata. Dan beberapa bulan berikutnya pemilu presiden. Kita sebagai warga negara sesuai dengan kedudukan dan perannya masing-masing akan berpartisipasi dalam pesta politik itu “untuk ikut memberikan arah yang benar, ikut berjuang, menjadi saksi nyata tentang kebenaran, keadilan dan cinta kasih”.

Atas kesadaran diri sebagai warga Negara Indonesia yang beragama Katolik, *The Soegijapranata Institute* Unika Soegijapranata menyelenggarakan diskusi “Umat Katolik Menegaskan Sikap Politik 2014” pada tanggal 1 Maret 2014 dengan nara sumber Mgr. Johannes Pujasumarta dan Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008 – 2013.

### Idealisme dan fakta empiris

Diskusi ini didasarkan pada dua hal. *Pertama*, tanggung jawab murid-murid Kristus terhadap kehidupan bernegara dan berbangsa berpijak pada sabda Yesus “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat 22:21). Sabda Yesus itu dengan jelas menegaskan bahwa murid-murid-Nya memiliki

kewajiban untuk melaksanakan kewajiban kepada Tuhan dan kepada nusa, bangsa, dan negara. Kewajiban kepada nusa, bangsa, dan negara ini lebih dari sekadar membayar pajak, namun terutama menyangkut kehidupan bangsa dan negara secara keseluruhan. Sabda itu juga memiliki makna bahwa kita adalah warga Negara dunia dan warga Kerajaan Allah dengan segala implikasi dan tuntutan. Mgr. Soegijapranata (1954) membahasakan kewargaan itu dengan pernyataan “Sebab kita adalah sungguh-sungguh Katolik, dari pada itu kita adalah sebenarnya patriot juga. Oleh karena kita merasa patriot seratus prosen, sebab itu kita pun merasa Katolik seratus prosen pula”. Pernyataan itu yang kemudian dikenal dengan semboyan 100 % Katolik, 100 % Indonesia.

Partisipasi dalam pemilu entah sebagai pemilih atau yang dipilih atau penyelenggara merupakan salah satu pelaksanaan panggilan suci murid-murid Yesus. Melalui partisipasi itu kita ikut memilih perencana, pengendali dan penentu arah perjalanan nusa, bangsa dan negara. Merekalah yang membuat sistem dan semua implikasi sub sistemnya dalam berbangsa dan bernegara.

*Kedua*, adalah fakta yang hidup dalam perpolitikan bangsa. Fakta ini mencakup 2 hal pula. Hal pertama adalah perilaku para perencana, pengendali dan pengatur negara yang penuh kerakusan, tipu muslihat, memikirkan kepentingan sendiri dan golongan yang kesemuanya itu dapat membuat kita pesimis dan bahkan apatis terhadap kehidupan bernegara. Pesimisme dan apatisisme itu juga muncul di



antara beberapa peserta diskusi. Perilaku berpolitik dan bernegara sebagian politisi dan penyelenggara negara jauh dari norma-norma moral yang dipahami dan diakui bersama serta jauh dari nilai-nilai Pancasila.

Hal kedua adalah peran umat dan pimpinan Gereja Katolik dalam berbangsa dan bernegara. Apabila membandingkan dengan masa perjuangan kemerdekaan hingga berakhirnya Orde Baru, partisipasi umat Katolik dalam kehidupan kenegaraan pada era 20 tahun terakhir agak memprihatinkan. Pada masa lalu kita memiliki pemimpin Gereja yang berani berdiri tegak dan berbicara lantang mengenai persoalan bangsa dan negara seperti Mgr. Soegijapranata. Demikian pula banyak awam baik secara perorangan maupun kelembagaan berperan besar dalam hiruk pikuk menegara membangun bangsa. Sementara sekarang tokoh-tokoh itu semakin menyusut jumlahnya. Hal itu antara lain tampak pada anggota legislatif pusat yang beragama Katolik. *Harian Kompas* (26/5/2009) memperlihatkan data persentase anggota legislatif yang

beragama Katolik 5,6 % pemilu 1999; 3,8 % pemilu 2004; dan 3,7 % pemilu 2009 dari total anggota legislatif.



Pimpinan Gereja pun setali tiga uang. Di samping "altar", pimpinan Gereja lebih banyak menaruh perhatian di "pasar" yang bukan bidang politik. Banyaknya umat Katolik yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif memudahkan menjadi tanda positif kesadaran perlunya berpartisipasi dalam berbangsa dan

bernegara. Para Uskup melalui Surat Gembala Pemilu 2014 sangat menghargai calon legislatif, "kami hargai Anda karena tertarik dan terpenggil terjun dalam dunia politik. Keputusan Anda untuk mempersembahkan diri kepada Ibu Pertiwi melalui jalan itu akan menjadi kesempatan untuk berkontribusi secara berarti bahkan maksimal bagi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia".

### Demokrasi kerakyatan

Pemilu merupakan salah satu cara menghasilkan para pemangku negara untuk menentukan arah dan masa depan bangsa yang merdeka dan sejahtera. Itulah sebabnya penyelenggaraan pemilu tidak bisa asal-asalan dan demikian juga memilihnya pun juga tidak asal-asalan. Kita tidak cukup dihibur dengan mengatakan bahwa sejak era reformasi Indonesia telah berhasil meninggalkan sistem dan cara-cara yang seolah-olah demokratis di bawah pemerintahan Orde Baru dan telah menjadi Negara paling demokratis ketiga di dunia. Pernyataan itu hanya hiburan semu seperti sinetron, karena cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana

tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 masih jauh dari terwujud. Karena itu cita-cita para pendiri bangsa harus menjadi ukuran untuk mengevaluasi sistem dan produk politik dua dekade terakhir.

Sejalan dengan argumentasi itu, Mgr. Johannes Pujasumarta memberikan paparan dengan mendasarkan pada sila ke-4 Pancasila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Menurutnya, demokrasi kerakyatan adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan mestinya jauh dari politik uang, tidak mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan pribadi dan atau kelompok, tidak memanipulasi perbedaan SARA, tidak menggunakan uang rakyat untuk bancakan. Obyektivitas kualitas dan integritas pribadi dan ketercapaian cita-cita bangsa Indonesia harus menjadi ukuran seluruh proses politik. Politisi harus menggunakan proses politik untuk kebaikan umum (*bonum commune*).

### Memilih dengan cerdas

Melalui Surat Gembala pemilu 2014 para Uskup mengajak seluruh umat Katolik Indonesia untuk kembali menumbuhkan sikap patriotis sebagaimana semangat kegemalaan Mgr. A. Soegijapranata SJ dengan berpartisipasi dalam pemilu. "...selain merupakan hak, ikut memilih dalam Pemilu merupakan panggilan sebagai warga negara". Memilih dalam pemilu merupakan hak, namun dengan mempertimbangkan kondisi bangsa dan Negara para Uskup mendorong kepada umat Katolik untuk tidak memilih golput, melainkan memilih dengan cerdas dan sesuai dengan hati nurani. Dalam kondisi yang pilihannya buruk kita menggunakan prinsip *minus malum*, yaitu memilih

di antara pilihan yang tingkat keburukannya paling sedikit.

Ukuran kecerdasan dalam memilih adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Partai politik yang jelas tidak sejalan dengan 4 pilar itu harus tidak dipilih, meskipun ada calon-calon yang baik. Sebaik apapun calon itu, mereka tetap tunduk dan berpikir sesuai dengan ideologi atau nilai-nilai dasar partai politiknya. Meskipun, menurut Rustriningsih, sistem pemilu kita telah memberikan jembatan bagi masyarakat yang apatis terhadap parpol dengan memberikan alternatif untuk memilih kandidat yang dianggap baik, namun peran parpol masih tetap dominan. Rakyat tidak bisa menjadi caleg tanpa parpol dan demikian pula fakta menunjukkan bahwa anggota legislatif yang pilihan politiknya berbeda dengan pilihan politik fraksinya (parpol) disingkirkan dari parpol dan lembaga legislatif. Karena itu idealnya adalah memilih partai politik yang sesuai dengan 4 pilar kebangsaan yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa dan calon legislatif yang kompeten, memiliki komitmen, dan bermoral. Untuk memilih calon kita, menurut Rustriningsih, terlebih dahulu mempertimbangkan kejelasan rekam jejak setiap kandidat yang terjun dalam kontestasi politik pemilu legislatif dan pilpres 2014.

Marilah kita menjadi pemilih aktif yang cerdas dalam Pemilu 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban iman dan warga negara untuk menentukan nasib bangsa dengan mengikuti nasihat Mgr. A. Soegijapranata SJ kepada I.J. Kasimo "..... jangan biarkan orang lain mengambil keputusan mengenai nasibmu, tanpa kamu terlibat di dalamnya..." (Panduan APP 2014).

\*Penulis adalah Kepala The Soegijapranata Institute (TSI) Unika Soegijapranata